

PENGARUH KAPABILITAS APIP DAN MATURITAS SPIP TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DENGAN DIGITAL GOVERNMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Teddy Andrianus Mirah¹, Meinarni Asnawi², Dzulkifli Sultan³

Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia¹

Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia²

Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia³

Email: teddiandrea@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the influence of the Capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the Maturity of the Government Internal Control System (SPIP) on Good Governance, with Digital Government serving as a moderating variable in the Government of Mahakam Ulu Regency. The study employed a quantitative approach using an explanatory research design. The research population consisted of 1,107 civil servants, from which 285 respondents were selected using the Krejcie and Morgan sample size table and a stratified proportionate purposive sampling technique. Data were collected through a five-point Likert scale questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.1 software. The results indicate that APIP capability has a positive and significant effect on Good Governance ($\beta = 0.142$; $p = 0.046$), while SPIP maturity also has a positive and significant effect ($\beta = 0.388$; $p = 0.006$). Furthermore, Digital Government positively moderates the relationship between APIP capability and Good Governance ($\beta = 0.206$; $p = 0.045$), as well as the relationship between SPIP maturity and Good Governance ($\beta = 0.151$; $p = 0.005$). The research model demonstrates strong explanatory power, with an R^2 value of 0.766. These findings suggest that enhancing APIP capability, strengthening SPIP maturity, and optimizing Digital Government implementation are essential factors in promoting transparent, accountable, effective, and efficient governance within local government.

Keywords: *APIP Capability; Government Internal Control System (SPIP) Maturity; Digital Government; Good Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Digital Government sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Populasi penelitian berjumlah 1.107 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan sampel sebanyak 285 responden yang ditentukan menggunakan tabel Krejcie dan Morgan serta teknik *stratified proportionate purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,142$; $p = 0,046$), sedangkan Maturitas SPIP juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,388$; $p = 0,006$). Selain itu, Digital Government terbukti memoderasi secara positif hubungan Kapabilitas APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,206$; $p = 0,045$) serta hubungan Maturitas SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,151$; $p = 0,005$). Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat dengan nilai R^2 sebesar 0,766. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan implementasi Digital Government merupakan faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada pemerintah daerah.

Kata kunci: Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP; Digital Government; Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi semakin penting bagi pemerintah daerah, khususnya daerah otonomi baru yang masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengendalian internal. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain belum optimalnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian internal belum berjalan secara optimal (BPKP, 2021).

Upaya penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu terus dilakukan melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah mencapai kapabilitas APIP pada level 2 Plus, namun capaian tersebut masih menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berada pada tahap penguatan infrastruktur dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi (BPKP, 2021). Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi BPKP, maturitas SPIP pemerintah daerah masih berada pada kategori berkembang sehingga memerlukan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi pengendalian intern yang lebih sistematis (BPKP, 2023). Kondisi tersebut diperkuat oleh keterbatasan jumlah auditor dibandingkan kebutuhan ideal berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga efektivitas pelaksanaan audit, konsultasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 masih berada pada Level 2 (Infrastructure), sehingga fungsi pengawasan internal belum sepenuhnya efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (BPKP, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi assurance dan consulting masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sisi lain, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan efektivitas pengendalian, akuntabilitas, dan manajemen risiko pada perangkat daerah.

Sejalan dengan upaya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal tersebut, transformasi digital melalui penerapan *digital government* menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengawasan, pengendalian, pelaporan, dan pelayanan publik dilaksanakan secara lebih transparan, efisien, dan berbasis data (Djamil, 2023; Silmi, 2024). Namun demikian, implementasi *digital government* di Kabupaten Mahakam Ulu masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, serta belum optimalnya integrasi data antarperangkat daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya daerah otonomi baru, masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola, layanan digital, dan integrasi aplikasi (KemenPAN-RB, 2020). Situasi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana transformasi digital mampu mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif *Good Governance Theory* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum (UNDP, 2023). Rhodes (2017) menjelaskan bahwa *governance* merupakan pola pengelolaan pemerintahan yang melibatkan koordinasi berbagai aktor melalui sistem kelembagaan yang efektif, sedangkan Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi *good governance* sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengawasan internal, pengendalian organisasi, dan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kapabilitas APIP merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung terwujudnya *good governance*. APIP tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga memberikan layanan konsultasi, penjaminan mutu, serta pengelolaan risiko yang mendukung pengambilan keputusan organisasi (BPKP, 2023). Semakin tinggi kapabilitas APIP, semakin besar kemampuan organisasi dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi pemerintah. SPIP yang matang akan meningkatkan efektivitas pengendalian, mengurangi risiko penyimpangan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Jatmiko, 2020). *Digital government* diposisikan sebagai variabel moderasi karena pemanfaatan teknologi informasi diyakini mampu memperkuat efektivitas pengawasan APIP maupun implementasi SPIP melalui sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data (Djamil, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapabilitas APIP dan maturitas SPIP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Karaeng dan Oktaviani (2023) menemukan bahwa kapabilitas APIP dan maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Djamil (2023) juga menyimpulkan bahwa penguatan peran APIP meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian Setiawan dan Tami (2018) menunjukkan bahwa maturitas SPIP yang tinggi mampu meningkatkan akuntabilitas publik dan mendukung penerapan prinsip *good governance*. Di sisi lain, penelitian Sitorus dan Wibowo (2025) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu peningkatan kapabilitas APIP belum tentu meningkatkan efektivitas pengawasan apabila belum didukung independensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan tata kelola pemerintahan masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kajian empiris tersebut, terdapat beberapa *research gap*. Pertama, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi mengenai pengaruh kapabilitas APIP terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagian besar penelitian hanya menguji pengaruh langsung APIP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan atau akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan penelitian yang mengkaji tata kelola pemerintahan secara komprehensif masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian yang mengintegrasikan *digital government* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan tata kelola pemerintahan masih sangat sedikit, terutama pada konteks daerah otonomi baru seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model yang mengintegrasikan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP sebagai determinan tata kelola pemerintahan yang baik dengan *digital government* sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kualitas laporan keuangan atau akuntabilitas fiskal, penelitian ini menguji secara empiris bagaimana transformasi digital mampu memperkuat hubungan antara fungsi pengawasan internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan implementasi *good governance* pada pemerintah daerah otonomi baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terhadap tata kelola pemerintahan yang baik serta menguji peran *digital government* sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian *good governance*, pengawasan intern pemerintah, dan transformasi digital sektor publik. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam meningkatkan kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan implementasi *digital government* guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan menguji secara empiris pengaruh kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan *digital government* sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menguji hubungan kausal antarvariabel melalui analisis statistik berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Populasi penelitian berjumlah 1.107 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada seluruh OPD dan Inspektorat. Penentuan ukuran sampel mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan (1970) sehingga diperoleh sampel sebanyak 285 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified proportionate purposive sampling, yaitu membagi populasi ke dalam beberapa strata berdasarkan unit organisasi,

kemudian menentukan sampel secara proporsional dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun, terlibat dalam pelaksanaan tugas organisasi, serta memiliki pemahaman mengenai penerapan pengawasan internal, SPIP, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, evaluasi measurement model melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi structural model melalui pengujian koefisien determinasi (R^2), effect size (f^2), predictive relevance (Q^2), dan pengujian hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping. Pengujian efek moderasi digital government dilakukan menggunakan pendekatan product indicator untuk menguji interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi (Hair Junior et al., 2022).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Responden penelitian berjumlah 285 pegawai negeri sipil (PNS) yang dipilih menggunakan teknik *stratified proportionate purposive sampling*. Karakteristik responden disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan, golongan, dan lama bekerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1 Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	165	57,89
	Perempuan	120	42,11
Usia	< 30 tahun	45	15,79
	30–40 tahun	110	38,60
	41–50 tahun	90	31,58
	> 50 tahun	40	14,04
Jabatan	Pejabat Struktural	75	26,32
	Staf/Pelaksana	210	73,68
Golongan	II	60	21,05
	III	180	63,16
	IV	45	15,79
Lama Bekerja	1–5 tahun	70	24,56
	6–10 tahun	105	36,84
	> 10 tahun	110	38,60

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Responden penelitian didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 165 orang (57,89%), sedangkan responden perempuan berjumlah 120 orang (42,11%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 30–40 tahun sebanyak 110 orang (38,60%), diikuti kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 90 orang (31,58%), yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif. Dari aspek jabatan, responden didominasi oleh staf/pelaksana sebanyak 210 orang (73,68%), sedangkan pejabat struktural berjumlah 75 orang (26,32%).

Berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar responden berada pada Golongan III sebanyak 180 orang (63,16%), diikuti Golongan II sebanyak 60 orang (21,05%) dan Golongan IV sebanyak 45 orang (15,79%). Sementara itu, berdasarkan lama bekerja, mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 110 orang (38,60%), diikuti masa kerja 6–10 tahun sebanyak 105 orang (36,84%), dan 1–5 tahun sebanyak 70 orang (24,56%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja yang memadai dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai kapabilitas APIP, maturitas SPIP, implementasi digital government, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis meliputi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), *Digital Government*, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kapabilitas APIP	285	16	60	46,84	13,80
Maturitas SPIP	285	21	75	54,92	18,35
Digital Government	285	11	40	29,35	9,62
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	285	13	49	40,22	10,76

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang menunjukkan kecenderungan penilaian responden berada pada kategori cukup baik. Variabel Maturitas SPIP memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 54,92, diikuti Kapabilitas APIP sebesar 46,84, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebesar 40,22, dan Digital Government sebesar 29,35. Nilai standar deviasi pada seluruh variabel relatif lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen dan penyebaran data berada dalam kondisi yang baik untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS).

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dievaluasi berdasarkan nilai outer loading setiap indikator. Menurut Hair et al. (2022), suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading $\geq 0,70$. Hasil pengujian pada tahap awal menunjukkan bahwa terdapat 10 indikator yang memiliki nilai outer loading di bawah batas yang dipersyaratkan, yaitu Y2, Y7, Y10, X1.6, X1.10, X1.12, X2.15, Z5, Z2, dan X2.1, sehingga indikator-indikator tersebut dieliminasi dari model penelitian.

Setelah dilakukan eliminasi indikator dan estimasi ulang model, seluruh indikator yang dipertahankan memiliki nilai outer loading berkisar antara 0,701 hingga 0,811, sedangkan konstruk interaksi Digital Government $\times$ APIP dan Digital Government $\times$ SPIP masing-masing memiliki nilai 1,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pada model akhir telah memenuhi kriteria validitas konvergen sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3 Nilai Outer Loading Setelah Eliminasi Indikator

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kapabilitas APIP	X1.1	0,701	Valid
	X1.2	0,712	Valid
	X1.3	0,730	Valid
	X1.11	0,726	Valid
	X1.4	0,752	Valid
	X1.5	0,811	Valid
	X1.7	0,770	Valid
	X1.8	0,761	Valid
	X1.9	0,708	Valid
Maturitas SPIP	X2.10	0,737	Valid
	X2.11	0,713	Valid
	X2.12	0,786	Valid
	X2.13	0,753	Valid
	X2.14	0,760	Valid
	X2.2	0,719	Valid
	X2.3	0,780	Valid
	X2.4	0,706	Valid
	X2.5	0,786	Valid
	X2.6	0,720	Valid
	X2.7	0,745	Valid

	X2.8	0,714	Valid
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Y1	0,710	Valid
	Y3	0,754	Valid
	Y4	0,732	Valid
	Y5	0,726	Valid
	Y6	0,737	Valid
	Y8	0,739	Valid
	Y9	0,757	Valid
Digital Government	Z1	0,794	Valid
	Z3	0,777	Valid
	Z4	0,788	Valid
	Z6	0,717	Valid
	Z7	0,782	Valid
	Z8	0,755	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Reabilitas Konstruk

Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70 serta nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Hair Junior et al., 2022).

Tabel 4 Construct Reliability and Validity

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
APIP	0,898	0,917	0,550
SPIP	0,859	0,892	0,543
Digital Government	0,933	0,941	0,553
Tata Kelola Pemerintahan	0,862	0,897	0,591

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha antara 0,859–0,933, Composite Reliability antara 0,892–0,941, dan AVE antara 0,543–0,591. Seluruh nilai tersebut telah memenuhi kriteria yang direkomendasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan mampu menjelaskan varians indikator secara memadai.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan diuji menggunakan pendekatan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Menurut Hair et al. (2022), suatu konstruk memenuhi validitas diskriminan apabila nilai HTMT lebih kecil dari 0,90.

Tabel 5 Hasil Uji HTMT

Konstruk	APIP	DG	SPIP	TP
APIP	1	0,824	0,668	0,835
DG	0,824	1	0,833	0,820
SPIP	0,668	0,833	1	0,836
Tata Kelola Pemerintahan	0,835	0,820	0,836	1

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT berada pada rentang 0,489–0,849, yaitu di bawah batas maksimum 0,90. Dengan demikian, setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu mengukur konsep yang berbeda secara memadai dan tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen.

Tabel 6 Nilai R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Tata Kelola Pemerintahan	0,766	0,762

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 7 nilai R-Square untuk variabel Tata Kelola Pemerintahan sebesar 0,766 dengan R-Square Adjusted sebesar 0,762. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP yang dimoderasi oleh Digital Government mampu menjelaskan 76,6% variasi Tata Kelola Pemerintahan, sedangkan 23,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai R² sebesar 0,766 menunjukkan bahwa model struktural memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Effect Size (f²)

Effect size (f²) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tabel 7 Hasil uji Effect Size

Variabel	Tata Kelola Pemerintahan
APIP	0,321
SPIP	0,263
Digital Government	0,323
Digital government Modereasi APIP	0,316
Digital government Modereasi SPIP	0,267

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 7, nilai f² untuk APIP (0,321), SPIP (0,263), Digital Government (0,323), Digital Government × APIP (0,316), dan Digital Government × SPIP (0,267) seluruhnya berada pada kategori sedang (medium effect). Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel, termasuk efek moderasi Digital Government, memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menjelaskan variasi Tata Kelola Pemerintahan, meskipun belum mencapai kategori pengaruh besar.

Predictive Relevance (Q²)

Perhitungan nilai *Predictive Relevance* (Q²) dilakukan berdasarkan nilai R-Square sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,766) \quad Q^2 = 1 - 0,234 = Q^2 = 0,766$$

Nilai Q² sebesar 0,766 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki predictive relevance yang sangat baik, sehingga model yang dibangun mampu menjelaskan dan memprediksi variabel Tata Kelola Pemerintahan dengan baik.

Pengujian Hipotesis (*Path Coefficient/Bootstrapping*)

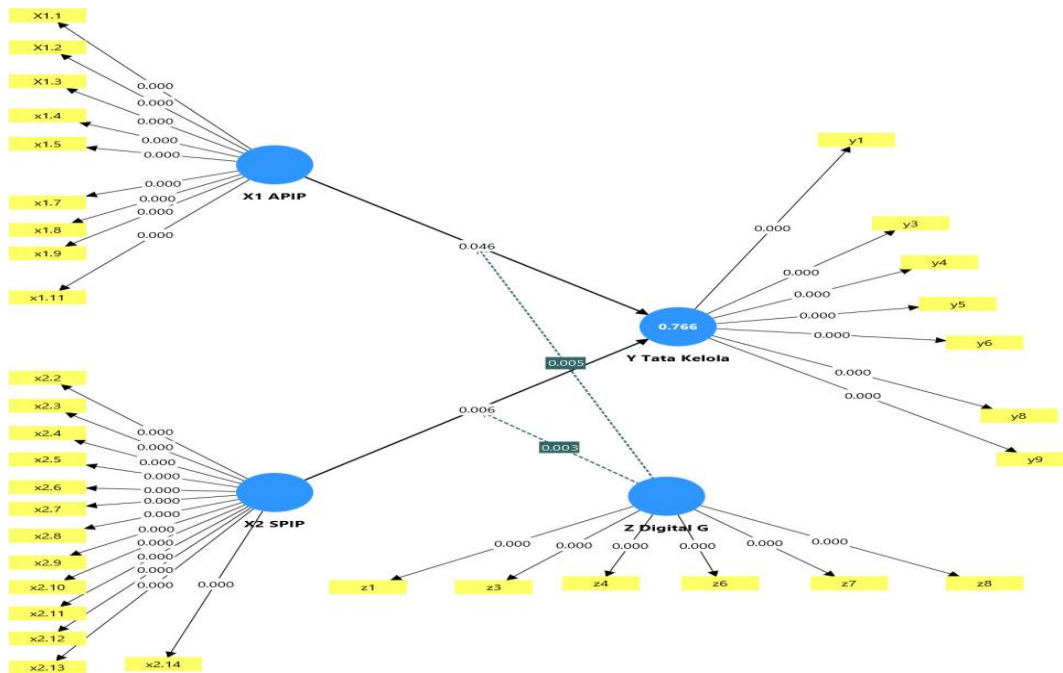
Metode bootstrapping digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar konstruk dalam model struktural dengan melihat nilai T-statistics dan P-values. Kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Hair Junior et al. (2022) yang menyatakan bahwa suatu hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 8 Hasil Uji Bootstrapping

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Keterangan
Pengaruh APIP terhadap tata kelola pemerintahan	0,142	2,324	0,046	Signifikan
Pengaruh SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan	0,388	2,758	0,006	Signifikan
DG memoderasi Pengaruh APIP terhadap tata kelola pemerintahan	0,206	2,003	0,045	Signifikan
DG memoderasi SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan	0,151	2,668	0,005	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS 4 (2026)

Hasil uji bootstrapping dalam penelitian ini juga disajikan dalam bentuk model struktural untuk memberikan gambaran visual mengenai hubungan antar variabel penelitian



Gambar 1 Hasil Bootstrapping Model Struktural (T-Statistics)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,142$; $t = 2,324$; $p = 0,046$), sedangkan Maturitas SPIP juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,388$; $t = 2,758$; $p = 0,006$). Selain itu, Digital Government terbukti memoderasi secara positif hubungan Kapabilitas APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,206$; $t = 2,003$; $p = 0,045$) serta memoderasi hubungan Maturitas SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan ($\beta = 0,151$; $t = 2,668$; $p = 0,005$). Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan Digital Government memperkuat pengaruh Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tata Kelola Pemerintahan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,142, T-statistics sebesar 2,324, dan P-values sebesar 0,046. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. APIP yang memiliki kapabilitas memadai mampu menjalankan fungsi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi secara efektif sehingga mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas fungsi audit internal akan memperkuat sistem pengendalian dan tata kelola organisasi. Semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP, semakin besar kontribusinya sebagai mitra strategis dalam pengelolaan risiko, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kinerja organisasi sektor publik.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025), Suhartono (2021), serta Rachmat dan Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus meningkatkan kapabilitas APIP melalui penguatan kompetensi auditor, penyempurnaan proses audit internal, serta optimalisasi peran APIP sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tata Kelola Pemerintahan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,388, T-statistics sebesar 2,758, dan P-values sebesar 0,006. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat maturitas SPIP, semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. SPIP yang matang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan ini sejalan dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern ditentukan oleh lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi kelima komponen tersebut secara terintegrasi akan memperkuat pengendalian internal, meningkatkan pengelolaan risiko, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dalam konteks sektor publik Indonesia, peningkatan maturitas SPIP juga mencerminkan semakin baiknya kualitas sistem pengendalian intern yang dibina oleh BPKP.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari et al. (2024), Sutaryo dan Sinaga (2020), serta Naida (2024) yang menunjukkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, efektivitas pengendalian internal, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus meningkatkan maturitas SPIP melalui penguatan lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko yang lebih sistematis, penyempurnaan kegiatan pengendalian, optimalisasi sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berkelanjutan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat.

Peran Digital government dalam Memoderasi Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Digital Government memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,151, T-statistics sebesar 2,668, dan P-values sebesar 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Digital Government memperkuat kontribusi Kapabilitas APIP dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Semakin baik implementasi pemerintahan berbasis digital, semakin efektif pula fungsi pengawasan APIP dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan konsep Digital Government yang dikemukakan oleh United Nations, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Penerapan sistem digital memungkinkan proses audit, monitoring, pelaporan, dan pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, APIP tidak hanya menjalankan fungsi assurance, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi strategis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Handayani et al. (2023), Mali et al. (2024), serta Yudanto dan Pesudo (2020) yang menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus memperkuat implementasi Digital Government melalui peningkatan integrasi sistem informasi, pengembangan infrastruktur teknologi, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik semakin optimal.

Peran Digital government dalam Memoderasi Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Digital Government memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh Maturitas SPIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,103, T-statistics sebesar 2,924, dan P-values sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Digital Government memperkuat kontribusi maturitas SPIP dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Semakin baik implementasi pemerintahan berbasis digital, semakin efektif pula sistem pengendalian intern dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif. Penerapan Digital Government, sebagaimana dikemukakan oleh United Nations, mendukung optimalisasi kelima komponen tersebut melalui pemanfaatan teknologi

informasi yang memungkinkan pengelolaan data, pelaporan, pemantauan, dan koordinasi antarperangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan demikian, implementasi SPIP menjadi lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Handayani et al. (2023), Mali et al. (2024), dan Wulandari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus memperkuat implementasi Digital Government melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi manajemen agar penerapan SPIP semakin efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas APIP dan maturitas SPIP berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Peningkatan kapabilitas APIP mampu memperkuat efektivitas fungsi pengawasan internal, sedangkan peningkatan maturitas SPIP mendukung terciptanya sistem pengendalian intern yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Digital Government terbukti memperkuat pengaruh kapabilitas APIP maupun maturitas SPIP terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor strategis yang meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan implementasi sistem pengendalian intern dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Mahakam Ulu.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan terus memperkuat kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi auditor, optimalisasi fungsi pengawasan, serta penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan. Di samping itu, percepatan penerapan *Digital Government* perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar transformasi digital mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan objek pada pemerintah daerah lain, menambahkan variabel yang relevan, atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
- BPKP. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*.
- BPKP. (2023). *Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2022: Pastikan Pemulihan Kawal Kesiapan*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Djamil, N. (2023). APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP: Government Internal Supervisory Apparatus in Implementing the Maturity of the Government Internal Control System. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 76–88.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Hair Junior, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*(3rd ed.). Los Angeles: SA.
- Handayani, F., Gamayuni, R. R., & Alvia, L. (2023). *The Impact of Implementing E-Government, the Government Internal Control System (SPIP), the Capability of the Government Internal Control Apparatus (KAPIP) on Corruption Prevention in Provincial Governments in Indonesia*.

<https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.13-9-2023.2341130>

- Husain, F. (2021). *Kinerja pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja dan Transparansi Publik*. CV. cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Karaeng, S., & Oktaviani, A. R. (2023). Pengaruh Kapabilitas Apip, Maturitas Spip dan Objektivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2(3), 326–338.
- KemenPAN-RB. (2020). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Satker/Pemerintah Daerah*.
- Mali, M. G., Wismaningtyas, T. A., & Wulandari, C. (2024). Analysis of Adaptation to Digital Transformation in Government Internal Supervision at Yogyakarta City and Sleman Regency Inspectorates. *Administratio*, 15(2), 71–83.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465–479.
- Rachmat, M., & Wijaya, C. (2024). Capability Development of Government Internal Control Apparatus in Improving the Effectiveness of Internal Control. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5).
- Ramadhan, S. A., & Wijaya, H. (2025). Analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Jurnal Liabilitas*, 10(2), 51–72.
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Network governance and the differentiated polity: Selected essays*. Oxford University Press.
- Setiawan, A. B., & Tami, R. P. (2018). Pengaruh Penerapan SAP Dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 76–89.
- Silmi, S. (2024). Analisis Maturitas: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 47–58.
- Sitorus, L., & Wibowo, P. (2025). *Determinants Of Government Internal Audit Quality Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Internal Pemerintah*.
- Suhartono, R. (2021). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. *MAKSI UNTAN*, 6(2).
- Sutaryo, S., & Sinaga, D. (2020). Government internal control system maturity: The role of internal guidance and external control of local government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 24–35.
- UNDP. (2023). *What is human development? Retrieved February 24, 2023, from United Nations Development Programme*. <https://hdr.undp.org/about/human-development>
- Wulandari, S. P., Muhammad, D. I. N., MASRUDDIN, M., & MASDAR, R. (2024). The Effect of Maturity of Government Internal Control System and Capabilities of Government Internal Supervisory Apparatus on the Government Performance Accountability System. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 3(2), 64–73.
- Yudanto, L. A., & Pesudo, D. A. A. (2020). Perception of civil servantâ€™s on APIP capability as moderating vari-able on the relationship between the implementation of SPIP and SAKIP (Study on Salatiga City Government). *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 183–199.